

INTISARI

ANALISIS POTENSI DAMPAK BENTUK POLA HUBUNGAN KOORDINASI TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH (TP4D) DENGAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DALAM RANGKA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM

Disusun oleh : Arfian Syahriza Adhyatama¹ dan Aminoto²

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis potensi dampak pola hubungan koordinasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Daerah terhadap pengawasan keuangan daerah. Tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pola hubungan koordinasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Daerah terhadap pengawasan keuangan daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga pengawasan dan keuangan negara. Setelah melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, penulis melakukan analisis.

Hasil dari penulisan hukum ini, terdapat beberapa potensi dampak yang mungkin terjadi pada pola hubungan antara Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Potensi tersebut antara lain adanya tumpang tindih, konflik kepentingan, keragu-raguan (*dubious*), perbedaan penafsiran materi kesalahan, hingga hubungan yang tidak harmonis antarlembaga pengawas. Potensi-potensi dampak tersebut muncul karena tidak adanya pengaturan mengenai ruang lingkup kewenangan pada produk hukum masing-masing antarlembaga.

Kata kunci : Hubungan antar Lembaga, Lembaga Pengawas, TP4D, APIP, Pengawasan Keuangan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Bagian Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

² Dosen Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE POTENTIAL IMPACTS OF PATTERN OF COORDINATION RELATIONSHIP BETWEEN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH (TP4D) AND APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) INSPEKTORAT DAERAH ON FINANCIAL SUPERVISION IN ORDER TO PROVIDE LEGAL CERTAINTY

By : Arfian Syahriza Adhyatama³ and Aminoto⁴

This legal research is aimed to identify and analyze the potential impact of the coordination pattern of Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah and Aparat Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Daerah regarding regional finances surveillance. The other objective is to identify and analyze the pattern of coordination relationship between Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Daerah to the surveillance of regional finances in order to provide legal certainty.

This legal research is using normative research methods. This method is done by analyzing the provisions of legislation. In this case, the authors use legislation relating to state supervisory and finance institutions. After reviewing the relevant legislation, the authors conducted an analysis.

As the result of this legal research, there are several potential impacts that may occur on the pattern of coordination between Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah and Aparat Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Daerah. These potentials include overlapping, conflict of interests, dubiousness, differences in material interpretation of errors, to unhealthy relationships between supervisory institutions. These potential impacts arise because of the lack of regulation regarding the scope of authority on the legal products of each inter-agency.

Keywords: *Relations between Institutions, Supervisory Agency, TP4D, APIP, Financial Supervisio.*

³ Student of Constitutional Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

⁴ Lecturer of Constitutional Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada